

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitia, W. (2019). Ekualisasi SPT Masa Dengan SPT Tahunan untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak pada PT A di Kota Solo. 88–99.
- Ahsan, Z. (2022). Sosains jurnal sosial dan sains. Jurnal Sosial dan Sains, 2(2), 278–285. <http://sosains.greenvest.co.id>.
- Alfarago, D. (2021). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Tata cara pengisian SPT Tahunan PPh Badan. <https://www.pajak.go.id/id/spt-tahunan-badan>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2015 tentang Perubahan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Januari 2024, penerimaan pajak positif capai Rp149,25 triliun. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Januari-2024,-Penerimaan-Pajak-Positif>
- Kusyenia, R. (2021). Implementasi prepopulated pajak masukan dan SPT masa PPN pada aplikasi efaktur 3.0. Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, 8(2), 172–182. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1919/898>
- Manado, R. (2019). Evaluasi perhitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Berkarya Jaya Hasil Makmur. Jurnal EMBA, 7(1), 1021–1030. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i1.23220>
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan (A. Dian, Ed.; Edisi 2019). Penerbit Andi.
- Pratama, I. (2018). Analisis ekualisasi SPT masa PPN dengan SPT PPh badan terhadap kewajiban perpajakan PT. Adiyana Teknik Mandiri. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 6(3), 117–122. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v6i3.29>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. (2018).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (2022).

Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49.

Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150.

Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111.

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

Resmi, S. (2022). Perpajakan: Teori & Kasus (Edisi ke-11). Penerbit Salemba Empat.

Sarjono, B. (2022). Ekualisasi SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh Terhadap Kewajiban Perpajakan CV. Abadi. 06, 183–196.

Umami, N. N. (2022). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). In PUSDANSI.ORG (Edisi Revisi, Vol. 2, No. 9). PT Rajagrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020).

